

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Marlinawati

*Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*

Dewi Kusuma Wardani

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Email: d3wikusuma@gmail.com*

Abstract

The purpose of this research is to know the influence between the Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology and Internal Control System Against Timeliness of Village Government Financial Reporting at Gunungkidul Regency. This research is causative research. The population is the village government in Gunungkidul Regency, especially in Gedangsari sub-district. Criteria of respondents in the study were to village and village apparatus. We use questionnaire to collect data. We use multiple regression with SPSS program version 16.0 to analyze data. We find that quality of human resources and internal control system have a positive influence on the timeliness of village government financial reporting. On the other hand, utilization of information technology does not influence the timeliness of village government financial reporting. These imply that the quality of human resources and internal control system can speed up the preparation of village government financial reporting.

Keywords:*village government financial reporting, quality of human resources, utilization of information technology, internal control system, and timeliness*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Lembaga-lembaga publik itu meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan

(Nihayah, 2015:3). UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan

pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Wardani dan Andriyani, 2017:54).

Fenomena yang terjadi pada pemerintahan desa saat ini ialah penyaluran dana desa yang sangat besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo, dalam kunjungannya meninjau Desa Sumurgeneng, Kecamatan Tasikharjo, Jawa Timur Senin, pada 28 November 2016, mengatakan bahwa pemerintah akan terus menaikkan anggaran dana desa. Dana desa dianggarkan Rp 47 triliun pada 2016, dan dana itu akan meningkat jadi Rp 60 triliun pada 2017. Bahkan beliau mengatakan mempunyai rencana untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi dua kali lipat dari sebelumnya untuk tahun 2018 (www.Liputan6.com, diakses 1 Maret 2017). Alokasi dana desa sebesar itu baru pertama kali dalam sejarah APBN Republik Indonesia. Penggunaan dana tersebut harus dikelola secara akuntabel di tengah minimnya akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa khususnya desa-desa yang berada di kabupaten Gunung Kidul yang memiliki jumlah penduduk miskin tergolong masih banyak (www.jogja.tribunnews.com, diakses 1 Maret 2017).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan desa untuk berbagai pihak dalam pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan nilai informasi salah satunya yaitu ketepatanwaktu. Nihayah (2015:5) mengatakan bahwa ketepatanwaktu adalah tersediaanya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan hendaknya mampu memberikan informasi yang tepat waktu serta bebas dari pengertian yang

menyesatkan (Susanti dan Wardani, 2017). Dengan demikian masyarakat desa akan percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar dan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan.

Ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintahan desa dipengaruhi berbagai sumber daya dan sarana pendukung. Wardani dan Andriyani (2017:54) mengatakan bahwa ada tiga sumber yang mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktu yaitu: sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, dan sistem pengendalian intern yang baik. Hal pertama yang mempengaruhinya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sembiring, 2013:2).

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. (Sembiring, 2013:2). Sumber daya yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2). Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146). Oleh

sebab itu diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya (Karmila, dkk, 2012:30). Penelitian ini didukung oleh Arista (2013:14) dan Sembiring (2013:9) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Yosefrinaldi (2013:12) mengatakan bahwa semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014:10). Penelitian ini didukung oleh Arista (2013:14) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Sistem pengendalian intern merupakan hal ketiga yang mungkin mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa. Sistem pengendalian intern merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan pemerintahan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel (Sembiring, 2013:5). Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat serta dapat meyakinkan masyarakat desa tentang keakuratan, keandalan, dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah desa. Penelitian ini didukung oleh Arista (2013:14) dan Sembiring (2013:9) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independen, dependen, dan studi empiris. Nihayah (2015:1) menggunakan sumber daya manusia dan Husna (2013:1) menggunakan pengawasan keuangan sebagai variabel independennya. Husna (2013:1) dan Arista (2013:1) menggunakan nilai informasi sebagai variabel dependennya dan Wardani dan Andriyani (2017:56) menggunakan keandalan sebagai variabel dependennya. Sembiring, (2013:1) melakukan studi empiris pada pemerintahan kota Padang, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independennya yaitu kualitas sumber daya manusia, dan variabel dependennya keandalan dan untuk studi empirisnya pada pemerintahan desa di Kabupaten Gunung Kidul yaitu desa Gedangsari. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Gunungkidul".

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.

Menurut Ariesta (2013:9) pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman yang rendah terhadap tanggungjawab sebagai seorang pekerja tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan waktu (Ariesta, 2013:13). Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan cepat dan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2).

Penelitian Lismawati (2011:11) menemukan kemampuan sumber daya berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari sumber daya manusia atau pegawai dapat mempengaruhi ketepatan waktu dari pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Nihayah (2015:12) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah.

H_1 : Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.

Sistem akuntansi di pemerintah daerah maupun desa sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu (Ariesta, 2013:8). Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan desa yang tepat waktu (Nihayah, 2015:7).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013:8) memberikan temuan empiris bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sembiring (2013:8) sesuai dengan hasil penelitian Nihayah (2015:7) Arista (2013:8) dan Safitri (2016:58-59) yang menemukan hal yang sama, akan tetapi hasil penelitian Prpto (2010:ci) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.

Apabila penyelesaian penyajian laporan keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat di butuhkan, maka relevansi dan manfaat

laporan keuangan untuk pengambilan keputusan akan berkurang. Ketepatan waktu laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (PP No.24 Tahun 2014). Sistem pengendalian intern yang baik tentunya akan berdampak baik pula pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa karena pelaporan dikerjakan tepat dan cepat supaya bisa selesai sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sembiring (2013:9) yang mengatakan bahwa semakin tinggi pengendalian intern dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan waktu pelaporan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya jika pengendalian intern meningkat maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat (Putri, 2016:146).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nihayah (2015:7-8) memberikan temuan empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian lainnya pada penelitian Sembiring (2013:8) dan Prapto (2010:cvi-cvii) menemukan bukti bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_3 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

METODA PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa yang berada di Kabupaten

Gunung Kidul yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa (www.bps.go.id). Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan metode *Purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2006). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Pelaksana Teknik, Kepala Urusan Pemerintah, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesra, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Dusun. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala desa dan perangkat desa merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintahan desa dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintahan desa Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan kriteria reponden diatas maka penentuan jumlah responden adalah 100 orang perangkat desa yang berada di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian ini Pengumpulan dilakukan melalui survai kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu skala *likert 5 point*.

METODE ANALISIS DATA

Pengembangan Istrumen Penelitian

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasional variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Pilot test dilakukan dan menguji validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Arfianti, 2011:25). Pengembangan Instrumen Kualitas Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel 1.

c. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

Tabel 1
Pengembangan Instrumen Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Item Pernyataan
1	Kemampuan individu (Nihayah, 2015).	1. Pemerintah desa anda memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup. 2. Staf pemerintah desa anda belum mampu menyusun laporan keuangan desa. 3. Pemerintah desa anda memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
2	Tingkat pendidikan (Arfianti, 2011).	4. Staf pemerintah desa anda merupakan lulusan SMA atau lebih tinggi
3	Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan (Arfianti, 2011).	5. Pemerintah desa anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas. 6. Peran dan tanggungjawab seluruh staf pemerintah desa anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan desa
4	Memahami prosedur dan proses akuntansi (Arfianti, 2011).	7. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi. 8. Uraian tugas staf pemerintah desa anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. 9. Pemerintah desa anda telah melakukan proses akuntansi.
5	Pelatihan yang teratur (Arfianti, 2011)	10. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber peralatan, pelatihan yang dibutuhkan. 11. Pelatihan-pelatihan untuk membantu pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Zuliarti, 2012). Pengembangan Instrumen Pemanfaatan Teknologi Informasi disajikan pada tabel 2.

undangan (PP 60 tahun 2008). Pengembangan Instrumen Sistem Pengendalian Intern disajikan pada tabel 3.

d. Ketepatanwaktuan

Pengembangan Instrumen Ketepatanwaktuan disajikan pada tabel 4.

Tabel 2
Pengembangan Instrumen Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Indikator	Item Pernyataan
1	Proses kinerja secara elektronik (Pramudiarta,2015)	1. Pemerintah desa anda memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. 2. Proses akuntansi sejak awal hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
2	Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan (Nihayah, 2015)	3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Pengolahan informasi dengan jaringan internet (Pramudiarta,2015)	4. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja desa. 5. Unit kerja desa anda belum ada jaringan internet. 6. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4	Sistem manajemen (Pramudiarta, 2015)	7. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
5	Proses kinerja secara elektronik (Pramudiarta,2015)	8. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 9. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. 10. Sistem keamanan komputer (antivirus diperbarui secara teratur

Tabel 3
Pengembangan Instrumen Sistem Pengendalian Intern

No	Indikator	Item Pernyataan
1	Perancangan yang memadai (Pramudiarta, 2015)	1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).
2	Penggunaan dokumen dan catatan yang memadai (Arfianti, 2011)	2. Pembuatan serta penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
3	Pemisahan wewenang (Arfianti, 2011)	3. Adanya pemisahan wewenang secara tepat dalam melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 4. Dalam melakukan transaksi belum adanya pemisahan wewenang secara tepat
4	Pembatasan akses (Arfianti, 2011)	5. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses.
5	Tindakan disiplin atas pelanggaran (Arfianti, 2011)	6. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
6	Langkah-langkah pencegahan kerusakan dan terhentinya operasi komputer (Arfianti, 2011)	7. Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.

Tabel 4
Pengembangan Instrumen Ketepatanwaktuan

No	Indikator	Item Pernyataan
1	Informasi laporan (Sembiring, 2013)	1. Informasi laporan keuangan desa yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta. 2. Informasi laporan keuangan desa yang dibutuhkan belum tersedia ketika diminta.
2	Laporsan yang sistematis (Indriasari, 2008)	3. Laporan-laporan desa berikut disediakan secara sistematis dan teratur: a) Laporan harian desa. b) Laporan Mingguan Desa. c) Laporan Bulanan Desa. d) Laporan Semester Desa. e) Laporan Tahunan Desa.
3	Penyajian Laporan teratur (Safitri, 2016)	3. Laporan-laporan desa berikut ini disampaikan secara sistematis dan teratur: a) Laporan Realisasi semester pertama b) Laporan Realisasi Anggaran atau Laporan perhitungan APBD c) Neraca d) Catatan atas Laporan Keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa satu butir pernyataan di nyatakan tidak valid sedangkan yang lainnya dinyatakan valid. Butir pernyataan yang tidak valid dikarenakan nilai *pearson correlation* kurang dari nilai r-tabel ($0,057 < 0,2352$) dan nilai signifikansinya di atas nilai alpha, yaitu 0,05. Butir pernyataan yang dinyatakan valid jika nilai *pearson correlation* besar dari nilai r-tabel ($0,501-944 > 0,2352$) dan nilai signifikansinya di bawah nilai alpha, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa satu butir pernyataan di nyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,700 (antara 0,879-0,918).

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Fit Model (F)

Hasil Uji Simulatan (uji F) disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 uji fit model (uji F) menyatakan bahwa salah satu dari ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 34,578 yang berada di atas nilai F tabel, yaitu 2,74. Dengan demikian maka salah satu dari ketiga variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dapat berpengaruh simultan terhadap variabel dependen ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji F)

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1.	<i>Regression</i>	1529,719	3	509,906	34,578	,000(a)
	<i>Residual</i>	973,267	66	14,746		
	<i>Total</i>	2502,986	69			

Predictors: (Constant), X1, X2, X3. Dependent Variabel Y2

Sumber : Data primer diolah 2017

pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa model fit.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	782a	0,611	0,593	3,84

Predictors: (Constant), X1, X2, X3.

Dependent Variabel Y2

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,593 atau 59,3%. Hal ini

menunjukkan bahwa ketiga variabel dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa sebesar 59,3%, sedangkan sisanya 40,7% tergantung oleh variabel lain.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t) disajikan pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa:

a. Hipotesis 1: Kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa

Berdasarkan tabel 5, kualitas sumber daya manusia memiliki nilai t-hitung 3,043 lebih besar dari nilai t-tabel 1,66864 dengan nilai signifikansi 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Model</i>		<i>unstandardized coefficients</i>		<i>Standardized coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1.	(constant)	-3,252	4,278		-0,76	0,45
	Kualitas Sumber Daya Manusia	0,561	0,185	0,402	3,043	0,003
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-0,011	0,259	-0,008	-0,044	0,965
	Sistem Pengendalian Intern	0,753	0,306	0,432	2,457	0,017

berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_1 terdukung dan H_0 ditolak.

b. Hipotesis 2: Pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa

Berdasarkan tabel 5, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t-hitung -0,044 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,66864 dengan nilai signifikansi 0,965. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_1 ditolak dan H_0 terdukung.

c. Hipotesis 3: Sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa

Berdasarkan tabel 5, sistem pengendalian intern memiliki nilai t-hitung 2,457 lebih besar dari nilai t-tabel 1,66864 dengan nilai signifikansi 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_1 terdukung dan H_0 ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara

simultan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

SARAN

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah Desa Kabupaten Gunung Kidul khususnya pemerintah desa-desa yang berada di Kecamatan Gedang Sari hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, agar dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang tepat waktu.
- b. Pemerintah Desa hendaknya memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, serta penyajian laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.
- c. Sistem pengendalian intern yang baik juga akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan tepat waktu. Pemerintah desa hendaknya memperhatikan sistem pengendalian intern terhadap perangkat-perangkat desa yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan desa, sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan.

Adapun beberapa saran untuk peneliti selanjutnya adalah :

- a. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi dengan metode lain, misalnya dengan wawancara, agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap.
- b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah sehingga dapat menambah variasi dalam penelitian selanjutnya misalnya kapasitas sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan pengawasan keuangan pemerintah desa.
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti transparansi (keterbukaan) dan keakuratan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita (2011), "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ariesta, Fadila (2013), "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)", *Jurnal*, Universitas Negeri Padang.
- Armando, Gerry (2013), "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi)", *Jurnal*, Universitas Negeri Padang.
- Final WP Edisi HUT 70 RI. (2015), Kawal Keuangan Desa. <http://www.bpkp.org/> Diakses pada tanggal 1 Maret 2017.
- Husna, Fadhilla (2013), "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)", *Jurnal*, Universitas Negeri Padang.
- Herawati, Trisna dkk. (2016), " Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng". *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Genesha Singaraja, Indonesia*, Vol. xx, No. yy.
- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo (2008), "Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)", *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak.
- Kadin, "Desa Bakal Jadi Ujung Tombang Pembangunan Ekonomi". <http://bisnis.liputan6.com> Diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

- Lismawati (2011), "Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.
- Mardiasmo (2005), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta.
- Nihayah, Anisatin (2015), "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Karesidenan Pati)", *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pramudiarta, Rizal (2015), "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)", *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Prpto, Susilo (2010), "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen)", *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Primayana, dkk. (2014), "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)", *Jurnal*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Putri, Dwi (2017), "Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan PEMDA (Study Empiris pada Satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Solok)", *Jurnal*, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Ramadhan, Swasana Dwi (2016) "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Safitri, Hudalida (2016), "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumanjang)", *Skripsi*, Universitas Jember.
- Sekaran, Uma (2006), *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

- Sembiring, Febriady Leonard (2013), "Pengaruh Kualitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat)", *Jurnal*, Universitas Negeri Padang.
- Susanti, Lina dan Wardani, Dewi Kusuma (2017), "Effect Utilization Of Information Technology On Quality Of Financial Statements With Internal Control System As A Moderating Variable", *International Conference & Call for Papers UST 2017*
- Suwardjono (2005), *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Andriyani, Ika (2017), "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten", *Jurnal Akuntansi Volume 5, No.2, Desember*.
- Yosefrinaldi (2013), "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)", *Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Zuliarti (2012), "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus", *Skripsi*, Universitas Muria Kudus.